

BAB III

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Potensi, Retribusi, Parkir, dan Retribusi Daerah.

1. Pengertian Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan¹¹. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan¹². Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan¹³. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsian¹⁴.

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

¹¹ Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), h. 358.

¹² Abi Hafiz, <http://www.abihafiz.wordpress.com>, Mei, 2013.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1096.

¹⁴ Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt), h. 504.

2. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan oleh pemerintah sebagai balas jasa¹⁵. Pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak, yaitu unsur-unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi, sedangkan imbalan (kontra-prestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah harus berdasarkan Undang-Undang, sifat pungutannya dapat dipaksakan, dilakukan oleh Negara, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atau pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan, pemberian izin tersebut antara lain:

a. Retribusi tempat penginapan.

Objek retribusi tempat penginapan adalah pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat penginapan adalah tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.¹⁶

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1096.

¹⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 631.

b. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.¹⁷

c. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.

Objek retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.¹⁸

Karena retribusi kontra prestasinya langsung dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis, artinya apabila seseorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan. Namun, apabila manfaat

¹⁷*Ibid*, h. 632.

¹⁸*Ibid*, h. 630.

ekonominya telah dirasakan, tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti pajak.¹⁹

Jadi retribusi dapat diartikan sebagai pungutan oleh pemerintah sebagai imbalan atas jasa terhadap pemberian izin tertentu yang diterima oleh orang atau badan.

3. Pengertian Parkir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia parkir merupakan kegiatan menghentikan/menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan dengan posisi berjajar.²⁰ Parkir adalah menghentikan kendaraan beberapa waktu lamanya.²¹ Sedangkan menurut Yardianto dalam kamus umumnya berpendapat bahwa parkir adalah kegiatan menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor.²²

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.²³

¹⁹ Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 5.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1023.

²¹ Hoetomo, MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mitra Pelajar, 2005) h. 370.

²² Yardianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S, 2000), h. 412.

²³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), h. 633.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Sedangkan yang dimaksud sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.²⁵

Dari beberapa pengertian parkir di atas dapat disimpulkan bahwa parkir adalah tempat dimana kendaraan berhenti dengan jangka waktu yang tidak lama dengan posisi tertentu.

4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.²⁶

²⁴ A. Budi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 99.

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012.

²⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 78.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁷

B. Konsep Retribusi dalam Islam Terkait dengan Konsep Kebijakan Publik

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan.

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh

²⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), h. 135.

karena itu melalui UU No. 33 Tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33/2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya, yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, pendanaan sangatlah penting karena tanpa adanya danayang cukup dan memadai maka pembangunan yang direncanakan akan sulit untuk direalisasikan. Untuk membiayai pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cara menggali potensi-potensi yang ada di daerah itu guna membiayaai pembangunan. Salah satu sumber potensi daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah adalah dengan memlalui penerimaan retribusi, dalam hal ini adalah retribusi parkir, karena retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat mendukung dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah yang disebut juga dengan (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan pajak dan retribusi berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang ada.

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang direvisi menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No 33 Tahun 2004, adalah cetak biru pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Akan tetapi, beberapa hal nampaknya masih perlu disempurnakan, karena beberapa Peraturan Pemerintah yang krusial untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut masih belum terbit, seperti misalnya Peraturan Pemerintah tentang kewenangan daerah. Disamping itu, sosialisasi nampaknya masih perlu dilakukan lebih intensif lagi, karena baru beberapa waktu setelah Undang-undang No 32 dan 33 Tahun 2004 terbit, sudah ada pihak-pihak yang menuntut untuk dilakukan revisi. Isu koordinasi yang kurang baik nampak menonjol disini. Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi yang dimulai sejak 1 Januari 2001 tersebut ternyata cukup lancar, meskipun banyak pihak sebelumnya merasa skeptis mengingat adanya beberapa perubahan drastis yang dilakukan dalam berbagai bidang.²⁸

Desentralisasi fiskal, yang merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan

²⁸ LPEM-FEUI, 2002, *Studi terhadap Status dan Kebutuhan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LPEMFEUI-JICA–Departemen Dalam Negeri, Jakarta, h. 5.

kebutuhan daerah itu sendiri. Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepastian mengenai jumlah alokasi dan mekanisme penyaluran akan menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan jenis dan tingkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pada intinya, desentralisasi fiskal berupaya memberikan jaminan kepastian bagi pemerintah daerah bahwa ada penyerahan kewenangan dan sumber-sumber pendapatan yang memadai untuk memberikan pelayanan publik dengan standar yang telah ditentukan.

Tetapi pola desentralisasi fiskal yang hingga sekarang diterapkan di Indonesia masih terfokus pada otonomi pembiayaan, bukan pada otonomi pendapatan. Sekalipun daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri tetapi ada pengecualian terhadap eksplorasi Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, pola transfer keuangan dari pusat ke daerah masih menjadi elemen penting untuk menunjang kapasitas keuangan daerah.²⁹

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal di dalam teori ekonomi Islam yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan khulafaur Rasyidin,

²⁹ Bambang Brodjonegoro, *Desentralisasi Sebagai Kebijakan Fundamental untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Mengurangi Kesenjangan Antardaerah di Indonesia*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Maret, (Jakarta: tt, 2006), h. 33.

serta kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama.³⁰ Kebijakan-kebijakan fiskal tersebut diantaranya :

1. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Fiskal dalam Islam memiliki prinsip bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari semua kitab agama masa dahulu, Al-Qur`an-lah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan. Kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran dan yang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum Hukum Islam seperti ditetapkan dalam al-Qur`an dan Sunnah.³¹

Dalam fiskal ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang di jelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Jadi, bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.

³⁰ Salman Alfarisy, <http://www.salmantotal.staff.fkip.uns.ac.id/2010/07/21/kebijakan-fiskal-dalam-perspektif-Islam/>, Mei, 2013.

³¹ Azhar Muttaqin, <http://www.azhar76.wordpress.com/2008/08/27/kebijakan-fiskal-dan-anggaran-belanja-dalam-Islam/>, Mei, 2013.

Beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

- a) Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam, pemerintah muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Qur'an.
- b) Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam.
- c) Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil.
- d) Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat Muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam.
- e) Negara Islam adalah Negara yang sejahtera, kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual.
- f) Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya kehidupannya, tapi juga hartanya untuk menjaga agama.
- g) Hak perpajakan dalam Islam tak terbatas.³²

Salah satu persoalan lain dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara yang Muslim. Sebagian besar ulama fiqh memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Penelitian ini berusaha untuk menjawab bagaimana landasan pengintegrasian zakat dan pajak tersebut. Dan bagaimana pengaruh teori-

³² Kaesyar, <http://www.kajianekonomiislam.blogspot.com/2010/08/kebijakan-fiskal-dalam-ekonomi-islam.html>, April, 2013.

teori tentang kebijakan fiskal terhadap hukum zakat. Karena itu, upaya pengintegrasian zakat dan pajak tersebut adalah dengan melakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada masa awal Islam. Sehingga pengintegrasian zakat dan pajak ini dapat dilakukan dengan keberanian merumuskan kembali konsep zakat dalam Islam. Hal ini tentu akan menyebabkan pergeseran dalam hukum zakat.

Pengaruh kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat terjadi pada subyek dan obyek pajak, tarif, dan sasaran pendistribusian zakat. Subyek zakat dalam kebijakan fiskal adalah perorangan dan badan hukum. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap obyek zakat adalah jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya tidak terbatas pada jenis-jenis harta tertentu, tetapi juga meliputi berbagai jenis kekayaan lainnya menurut kebijakan pemerintah. Pengaruh kebijakan fiskal dalam hal tarif atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagaimana dalam pajak, tarif zakat menjadi tidak tetap, bisa saja dikenakan tarif proporsional, tarif regresif dan tarif progresif sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang akan dicapai pemerintah.

Sedangkan pengaruh terhadap sasaran pendistribusian zakat adalah perluasan makna asnaf yang telah ditetapkan al-Qur'an dengan bertujuan untuk terpenuhinya pengeluaran pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Sehingga penelitian ini memberikan kontribusi bagi penemuan hukum Islam, yaitu penemuan hukum dengan memakai pendekatan ekonomi makro yakni adanya pengaruh kebijakan fiskal

negara terhadap hukum zakat, baik dari segi subyek, obyek, tarif, dan pendistribusiannya. Secara praksis, penetapan hukum zakat mengacu kepada tujuan dan filosofi zakat itu sendiri.

2. Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Saw

Ekonomi Islam sebenarnya sudah dimulai sejak Rasul Hijrah ke Madinah yang dululunya sebelum Nabi Hijrah ke Madinah kota tersebut bernama Yatrib, setelah Rasul pindah ke Yatrib kota tersebut dirubah namanya menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi) disingkat dengan nama Madinah. Nabi hijrah tersebut terjadi pada tahun 622M, sejak tahun itulah dimulai Sistem Ekonomi Islam.

Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin perekonomian masyarakat Madinah dan sekaligus menjadi kepala pemerintahan masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa Rasulullah masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi.

Karakter umum dari perekonomian pada masa Rasulullah adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syari'at Islam, sementara sumberdaya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan

masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.

Sebagaimana pada masyarakat arab lainnya, mata pencarian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang gersang. Berbeda dengan tanah yang berada di Madinah relatif subur sehingga pertanian, perternakan, dan perkebunan bias dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar berada dakam bingkai etika dan moralitas Islam, Maka Rasulullah mendirikan Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (*market controller*). Rasulullah juga membentuk Baitul Maal, sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan Negara. Baitul Maal ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sewaktu Rasulullah berada di Madinah, mulailah Rasulullah mengatur kehidupan muhajirin (Mukmin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah) dan Anshar (Mukmin yang berada di Madinah). Rasulullah Saw mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Oleh karena itu, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi

kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai langkah awal pembangunan Madinah. Selanjutnya untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerjasama antara anggota masyarakat (misalnya muzaraah, mudharabah, musraqah, dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktifitas. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat muslim, maka sumber penerimaan Negara juga meningkat. Sumber pemasukan Negara berasal beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan ushr.

Adapun sumber-sumber penghasilan negara pada zaman Rasulullah untuk membangun Negara Islam dan mengembangkan ajaran Islam di jazirah arab adalah sebagai berikut:

a. Ghanimah

Dengan adanya perang badar pada abat ke-2 Hijriah, Negara mulai mempunyai pendapatan dari seperlima rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan khums.

b. Jizyah

Pada masa Rasulullah sudah terdapat jizyah yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang non Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya jizayah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tujuan utamanya adalah untuk kebersamaan dalam menanggung beban Negara yang bertugas

memberikan perlindungan dan juga sebagai dorongan bagi kaum kafir untuk masuk Islam.

c. Kharaj

Adapun sumber lain penghasilan pada masa Rasulullah untuk pembangunan Negara bersal dari kharaj (pajak tanah) yang dipungut kepada non Muslim ketika Khaibar ditaklukkan, Jumlah Kharaj dari tanah itu tetap setengah dari hasil produksi. Jadi pengertian kharaj adalah kebijakan fiskal yang diwajibkan atas tanah petanian terhadap Negara-negara Islam yang baru berdiri. Para fuqaha menetapkan bahwa Al-kharaj adalah rezki yang diberikan oleh Allah kepada kaum Muslim karena kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka, kewajiban Kharaj dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

d. Ushr

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Jadi, ushr ini diwajibkan pada komoditas perdagangan yang di Ekspor maupun di Inpor dalam sebuah Negara Islam. Ushr juga dipungut terhadap pedagang kafir zimi yang melewati perbatasan, disebabkan karena adanya perjanjian damai antara kaum muslim dengan kaum mereka, yang salah satu poinnya menyebutkan tentang ushr ini.

e. Zakat

Zakat dan ushr adalah pendapatan yang paling utama bagi Negara pada masa Rasulullah hidup. Kedua jenis pendapatan ini berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr adalah kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar islam. Ditinjau dari sisi keuangan publik maka pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam di dalam tangan seseorang. Apabila harta tersebut sudah cukup nisbahnya maka berdasarkan ketentuan syari'at Islam yang ada, harta yang ada wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, terlihat disini ada usaha untuk mendorong orang untuk memutarakan hartanya kedalam system perekonomian. Dalam hal ini tampak tujuan distribusi dari kebijakan fiskal. Dalam hal ini kebijakan zakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

f. Ahwal Fadhla

Ahwal fadhla, yaitu harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meniggalkan negerinya.

g. Nawaib

Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang yang

dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.³³

Seperti halnya pada pemerintahan sekarang, pemerintah akan mengenakan berbagai bentuk pungutan sebagai salah satu sumber pendapatannya. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah akan terus menggali berbagai bentuk pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerahnya, walaupun terkadang tidak lagi memperhatikan kemampuan warganya.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, seperti dalam firman Allah SWT di sebutkan untuk mentaati ulil amri (Pemerintah) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
نُزِعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul

³³ Ahmad Istianto, <http://www.syariah99.blogspot.com/2013/05/kebijakan-fiskal-pada-awal-pemerintahan.html>, Mei, 2013.

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisaa Ayat 59).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti halnya sebagai berikut:

1. Taat kepada Rasul dan Ulil Amri dalam ayat ini bersifat mutlak, selama Ulil Amri tidak memerintahkan kepada yang dilarang oleh Allah swt.
2. Rasul memiliki dua kedudukan. Pertama, menjelaskan hukum-hukum Tuhan dan menunaikan risalahNya. Kedua, mengelola urusan masyarakat dan menjelaskan peraturan-peraturan pemerintahan berdasarkan kebutuhan.
3. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan mazhab Islam adalah merujuk kepada al-Quran dan Sunnah Rasul yang diterima oleh semua orang.
4. Masyarakat haruslah menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pimpinan yang adil.³⁴

Dalam beberapa haditsnya Rasulullah juga memerintahkan agar senantiasa taat kepada pemerintah.

Dari Abu Najih 'Irbadh bin Sariyah radhiallahu 'anhu dia berkata, “Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan mencururkan air mata. Kami bertanya,

³⁴ Taufiq Kamil Siregar, <http://www.suratannisa-ayat59.blogspot.com/>, Mei, 2013.

“Wahai Rasulullah, seperti ini adalah nasihat perpisahan, karena itu berilah kami nasihat”. Beliau bersabda, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla, tunduk taat (kepada pemimpin) meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini hasan shahih”.

Dalam Hadis riwayat Ibnu Abbas ra., ia berkata: Ayat ini turun: “Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan kepada ulil amri (pemimpin) di antara kamu berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi, yang diutus Nabi saw. dalam suatu pasukan perang”. (H.R Muslim). Hadis lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.: Dari Nabi saw. beliau bersabda “Barang siapa yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhiku dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakaiku”. (H.R Muslim).

Merupakan kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati pemerintah selama tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, walaupun hal tersebut tidak disukainya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.: Dari Nabi saw. beliau bersabda “Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat dalam melakukan perintah yang disukai atau pun tidak disukai, kecuali bila diperintahkan melakukan maksiat. Bila dia diperintah melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar serta taat”. (H.R Muslim).

Kewajiban taat hanya pada sesuatu yang baik, adapun dalam hal-hal yang bersifat kemaksiatan maka tidak ada ketaatan di sana. Walaupun demikian ketika pemerintah menetapkan satu peraturan yang tidak kita sukai maka bukan berarti kita menentangnya. Jika kita mampu maka nasehatilah pemerintah dengan cara yang baik. Sebagaimana Hadis riwayat Abdullah ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda “Sesungguhnya akan muncul sepeninggalku sifat egois (pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri sendiri) dan beberapa perkara yang tidak kamu sukai. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepada seorang dari kami yang mengalami zaman itu? Beliau menjawab: Laksanakanlah kewajiban kamu dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hakmu”. (H.R Muslim).

Maka setiap warga Negara wajib untuk mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk dalam masalah retribusi. Beberapa kaidah fihiyyah juga membahas tentang hak dari pemerintah untuk memungut retribusi secara umum kepada warga negaranya karena adanya kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan maka dilarang, sebagaimana kaidah fihiyyah yang menegaskan “Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan syari’ah”. Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syari’ah adalah pencurian atau perampokan harta yang ada sanksinya, tetapi jika dibenarkan oleh syari’ah maka diperbolehkan. Misalnya : petugas zakat dibolehkan mengambil harta zakat dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat.